BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 929//Pid.B/2015 sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim yang digunakan berdasarkan pasal 245 KUHP dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta juga melihat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan ulasan tuntutan jaksa. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 36 ayat 3 bahwa putusan ini sangatlah rimgan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal diatas.
2. Dari analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 929/Pid.B/2015. tentang tindak pidana pengedaran mata uang palsu merupakan suatu tindak pidana penipuan yang berkenaan dengan harta yang dapat dikenakan sanksi yang ada dalam jarimah takzir, dimana merupakan otoritas hakim dalam memberikan sanksi. Adapun jarimah takzir yang dapat dikenakan pada tindak pidana tersebut adalah pidana penjara dan juga dikenakan pidana denda yang diserahkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim sesuai dengan tujuan pemberian hukuman denda, yang mana hukuman ini dijatuhkan terkait tindak pidana penipuan.

B. Saran

1. Adanya undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang diharapkan dapat digunakan sebagai peraturan yang khusus terhadap KUHP. Hal itu dilakukan supaya penegak hukum kejahatan terhadap mata uang lebih memberikan efek jera kepada pelakunya.
2. Untuk pemerintah hendaklah dapat memperhatikan dengan sungguh-sunguh untuk memberikan peendidikan moral dan kesempatan yang lebih banyak terhadap lapangan kerja karena faktor utama penyebab tindak pidana pengedaran uang palsu pada umumnya karena adanya tekanan ekonomi.
3. Sebagai masyarakat harus waspada terhadap uang palsu, agar tidak tersebar luas terhadap beredarnya uang palsu tersebut. Dan pemerintah juga harus bertindak keras atas jeringan pengedaran uang palsu dikalangan masyarakat umum agar tidak terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id